

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017

Jl. syech abdurauf No 11

Tapaktuan - Aceh

Telp. 0656 21015 Fax. 0656 21015

e-mail : pn.tapaktuan@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. syech abdurauf No 11

Telp. 0656 21015 Fax. 0656 21015

Tapaktuan - Aceh

e-mail : pn.tapaktuan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tapaktuan, 02 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



IWAN RAHAYU, S.KOM
NIR.197811062011011004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tapak Tuan	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Tapak Tuan

Jl. syech abdurauf No 11 Tapaktuan - Aceh

Telp. 06 Fax. 06 e-mail : pn.tapaktuan@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tapaktuan, 02 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



IWAN RAHAYU, S.KOM
NIP.197811062011011004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 10.348.293 atau mencapai 344,94 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.627.531.871,- atau mencapai 93,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.821.822.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan pada laporan terlampir.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.904.813.195, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 174.400; Aset Tetap sebesar Rp. 14.904.638.795; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban disajikan sebesar Rp. 4.166.911,-, Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 14.900.646.284, Nilai Kewajiban dan Ekuitas disajikan sebesar Rp. 14.904.813.195;

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan pada laporan ini.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 10.348.275,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.724.475.925,- sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2.714.127.650,-) Kegiatan Non Operasional Surplus sebesar Rp. 180.850,- dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- dan,- sehingga entitas mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp. 2.713.946.800,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6.757.646.094,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp.2.713.946.800,-) kemudian ditambah dengan koreksi senilai Rp. Rp. 8.239.763.412,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.617.183.578,- dan ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp. 8.147.000.190,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 14.900.646.284,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.000.000	10.348.293	344,94	5.949.710
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah						
B.	Belanja Negara	B.2	2.821.822.000	2.627.531.871	93,11	194.290.129
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1.931.468.000	1.795.344.383	74,92	53.098.512
2.	Belanja Barang	B.2.2.	645.354.000	592.255.488	91,77	456.413.910
3.	Belanja Modal	B.2.3.	245.000.000	239.932.000	97,93	3.156.190.625
Jumlah Belanja Negara			2.821.822.000	2.627.531.871	93,11	194.290.129

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET	C.1		
Persediaan	C.1. 1.	174.000	0
Jumlah Aset Lancar		174.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	11.213.665.225	5.107.625.225
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.179.632.400	939.700.400
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	3.619.740.000	7.031.928.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	1.943.440	1.943.440
Akumulasi Penyusutan	C.2. 6.	(1.110.342.270)	(6.383.200.971)
Jumlah Aset Tetap		14.904.638.795	6.697.996.094
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	59.650.000	59.650.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(59.650.000)	0
Jumlah Aset Lainnya		0	59.650.000
Jumlah Aset		14.904.813.195	6.757.646.094
Kewajiban			
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga		4.166.911	0
Jumlah Kewajiban		4.166.911	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	14.900.646.284	6.757.646.094
Jumlah Ekuitas		14.900.646.284	6.757.646.094
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		14.904.813.195	6.757.646.094

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.348.275	5.949.710
Jumlah Pendapatan		10.348.275	5.949.710
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.795.344.383	1.863.947.223
Beban Persediaan	D. 3	52.343.327	27.610.750
Beban Jasa	D. 4	310.690.455	288.986.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	153.670.201	71.390.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	76.461.488	68.573.910
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	335.966.071	189.518.183
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.724.475.925	2.510.026.066
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.714.127.650)	(2.504.076.356)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		392.850	230.600
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		212.000	83.850
Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya		180.850	146.750
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		180.850	146.750

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.713.946.800)	(2.503.929.606)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	E. 1	6.757.646.094	3.706.206.267
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.713.946.800)	(2.503.929.606)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		8.239.763.412	68.119.535
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	8.302.676.772	0
Koreksi Nilai Aset Tetap non Revaluasi	E. 6	(59.650.000)	68.119.535
Koreksi Lain-lain	E. 7	(3.263.360)	0
Transaksi Antar Entitas		2.617.183.578	5.487.249.898
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 8	8.143.000.190	3.051.439.827
Ekuitas Akhir		14.900.646.284	6.757.646.094

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tapak Tuan

Visi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah Visi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah - Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik dalam konteks keterbukaan informasi di pengadilan

Misi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah Misi Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tapak Tuan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak manapun.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2016 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2017 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2017.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
10.348.293,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 10.348.293,- atau mencapai 344,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.000.000	2.468.075	246,80
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.000.000	7.880.200	394,01
	Total Pendapatan	3.000.000	10.348.293	344,94

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.398.583 dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Adanya Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.468.075	1.717.710	750.365	30,40
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7.880.200	4.232.000	3.648.200	46,29
	Total Pendapatan	10.348.293	5.949.710	4.398.583	42,50

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
2.627.531.871*

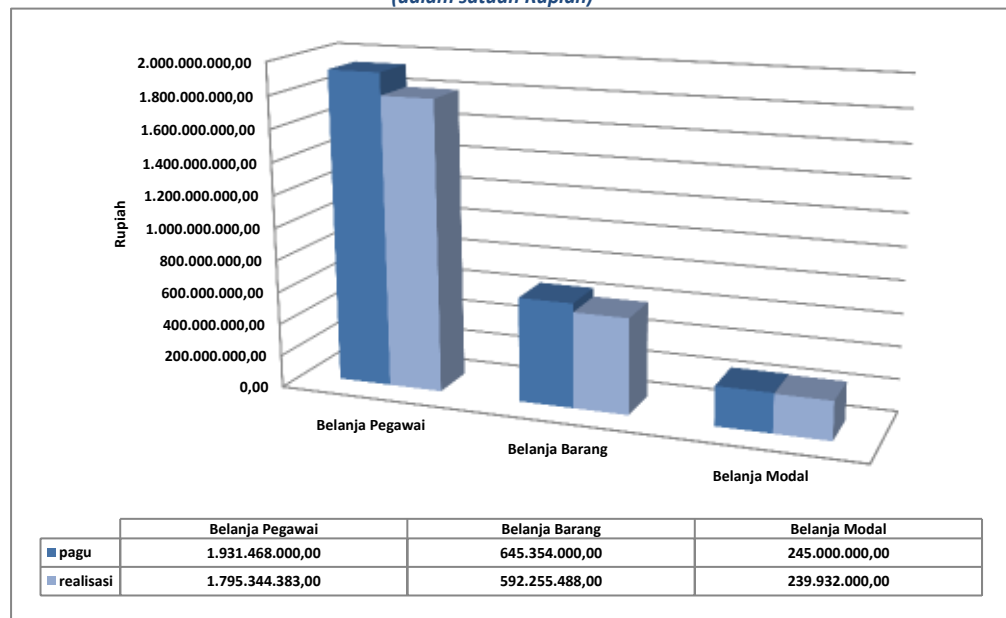
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.627.531.871,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 93,11% dari anggaran senilai Rp. 2.821.822.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.931.468.000	1.795.344.383	74,92
Belanja Barang	645.354.000	592.255.488	91,77
Belanja Modal	245.000.000	239.932.000	97,93
Total Belanja	2.821.822.000	2.627.531.871	93,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 2.856.667.737,- atau sebesar 52,17 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan

tersebut disebabkan karena:

1. Adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk TA 2016;

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.795.344.383	1.880.595.073	(85.250.690)	(4,53)
Belanja Barang	592.255.488	456.413.910	135.841.578	22,94
Belanja Modal	239.932.000	3.156.190.625	(2.916.258.625)	(92,40)
Total Belanja	2.627.531.871	5.493.199.608	(2.865.667.737)	(52,17)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
1.795.344.383*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.795.344.383,- dan Rp. 1.880.595.073.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 85.250.690 atau sebesar 4,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya realisasi belanja pegawai ;
2. Adanya mutasi pegawai ;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	672.320.720	666.769.940	5.550.780	0,83
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.475	9,877	1.598	13,92
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.248.570	48.581.140	(332.570)	(0,68)
Beban Tunj. Anak PNS	13.522.168	13.012.252	509.916	3,77

Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000	26.142.420	(10.420)	(0,04)
Beban Tunj. Fungsional PNS	728.990.000	782.570.000	(53.580.000)	(6,85)
Beban Tunj. PPh PNS	84.949.578	104.877.586	(19.928.008)	(19,01)
Beban Tunj. Beras PNS	35.558.220	34.471.920	1.086.300	3,05
Beban Uang Makan PNS	111.334.000	106.388.000	4.946.000	4,44
Beban Tunjangan Umum PNS	6.780.000	6.255.000	525.000	7,74
Beban Tunjangan Kemahalan	67.500.000	76.950.000	(9.450.000)	(12,28)
Hakim				
Beban Uang Lembur	0	14.752.000	(14.752.000)	(100)
Total Belanja Brutto	1.795.344.731	1.880.780.135	(85.435.404)	(4,54)
Pengembalian Belanja	(348)	(185.062)	(184.714)	(99,81)
Total Belanja Netto	1.795.344.383	1.880.595.073	(85.250.690)	(4,53)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
592.255.488*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 592.255.488,- dan Rp. 456.413.910,-

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 135.841.578 (22,94%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan anggaran belanja pada kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan ;
2. Naiknya belanja barang operasional dan belanja jasa pada kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Persediaan	52.343.327	27.610.750	24.732.577	47,25
Belanja Barang dan Jasa	306.523.544	288.986.000	17.537.544	5,72
Belanja Pemeliharaan	153.670.201	71.390.000	82,280.201	53,54

Belanja Perjalanan Dinas	76.461.488	68.573.910	7.887.578	10,32
--------------------------	------------	------------	-----------	-------

Total Belanja Brutto	592.255.488	456.413.910	135.841.578	22,94
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	592.255.488	456.413.910	135.841.578	22,94

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
239.932.000,-*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 239.932.000,- dan Rp. 3.156.190.625,- .

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.916.258.625,- atau 92,39 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan belanja modal berupa pengadaan tanah untuk perluasan gedung kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2016;

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal	239.932.000	3.156.190.625	(2.916.258.625)	(92,39)
Total Belanja Brutto	239.932.000	3.156.190.625	92.916.258.625)	(92,39)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	239.932.000	3.156.190.625	92.916.258.625)	(92,39)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 174.400,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 174.400,- dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Tapak Tuan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	174.400	0
Total Aset Lancar	174.400	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:*
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp.174.400,-

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 174.400,- dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	174.400	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		174.400	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
14.904.638.796

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 14.904.638.796,- dan Rp. 6.697.996.094,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	11.213.665.225	5.107.625.225	6.106.040.000
2	Peralatan dan Mesin	1.179.632.400	939.700.400	239.932.000
3	Gedung dan Bangunan	3.619.740.000	7.031.928.000	(3.412.188.000)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.943.440	1.943.440	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		16.014.977.665	13.081.197.065	2.933.780.600
Akumulasi Penyusutan		(1.110.342.270)	(6.383.200.971)	5.272.858.701

Nilai Buku Aset Tetap	14.904.638.795	6.697.996.094	3.304.791.977
-----------------------	----------------	---------------	---------------

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
11.213.665.225*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.213.665.225,- dan Rp. 5.107.625.225,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	826	01.05.70.07.4.00.004	PEM. RI CQ. MARI	KANTOR PN. TTN	977.516.000
2	2	259	01.05.70.08.4.00.004	PEM. RI CQ. MARI	RUMAH DINAS	448.254.000
3	3	491	01.05.70.14.4.00.001	PEM. RI CQ. MARI	RUMAH DINAS	844.868.000
4	4	1350	01.05.70.08.4.00.009	PEM. RI CQ. MARI	RUMAH DINAS	2.029.482.000
5	5	826	01.05.70.04.4.00.013	PEM. RI CQ. MARI	RUMAH DINAS	1.490.611.000
6	6	1047	01.19.05.08.4.00.003	PEM. RI CQ. MARI	TANAH KOSONG	3.070.199.115
7	7	10.000	Sertifikat Hak Pakai No. 3 Tahun 2015	PEM. RI CQ. MARI	TANAH KOSONG	2.352.735.225
Jumlah						11.213.665.225

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya proses penilaian kembali / revaluasi BMN terhadap Tanah dan gedung yang dilaksanakan oleh KPKNL Banda Aceh pada Bulan Nopember 2017.

Kenaikan yang disebabkan oleh adanya revaluasi BMN dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	5.107.625.225
Revaluasi BMN / tambah	6.106.040.000
Revaluasi BMN / kurang	0
Penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2017	11.213.665.225

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.179.632.400*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.179.632.400,- dan Rp. 939.700.400,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	939.700.400
Mutasi Kurang	
Mutasi Tambah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin	239.932.000

Saldo per 31 Desember 2017	1.179.632.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(937.722.650)
Nilai Buku 31 Desember 2017	241.909.750

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 239.932.000,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari Semester II / Akhir TA 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Penambahan sebesar Rp 239.932.000,- merupakan pembelian menggunakan akun belanja barang berupa :

- a. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 239.932.000,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
3.619.740.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.619.740.000,- dan Rp. 7.031.928.000,-, perubahan karena adanya proses penilaian kembali atau revaluasi BMN yang dilaksanakan oleh KPKNL Banda Aceh ;

Nilai perolehan gedung dan bangunan setelah adanya revaluasi BMN dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	7.031.928.000
Revaluasi BMN / Tambah	0
Revaluasi BMN / Kurang	3.412.188.000
Saldo per 31 Desember 2017	3.619.740.000

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
1.943.440*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.943.440 dan Rp. 1.943.440.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.943.440 dan Rp. 1.943.440 adalah sama karena tidak adanya penambahan dan pengurangan ;

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(1.110.342.270)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (1.110.342.270) dan Rp. (6.383.200.971).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.179.632.400	(937.722.650)	241.909.750
2	Gedung dan Bangunan	3.619.740.000	(172.619.620)	3.447.120.380
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.943.440	0	1.943.440
	Jumlah	4.801.315.840	(1.110.342.270)	4.690.973.570

Aset Lainnya:
Rp. 0,-

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 59.650.000,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016
1	Aset tak Berwujud	59.650.000	59.650.000
2	Aset Lain-lain		0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	59.650.000	59.650.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(59.650.000)	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	59.650.000

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp. 59.650.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 59.650.000 dan Rp. 59.650.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	- software	48.650.000
	- Aset tak berwujud lainnya	11.000.000
	Jumlah Total	59.650.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 59.650.000 dan Rp. 59.650.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. adalah tidak ada perubahan

karena tidak adanya penambahan dan pengurangan ;

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 0* Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Tapak Tuan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	0
Penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2017	0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Tapak Tuan dan telah dilakukan penghapusan dari BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada pihak ketiga:
Rp. 4.166.911* Saldo Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.166.911 dan Rp. 0. Utang kepada pihak ketiga merupakan beban belanja yang masih harus dibayar meliputi beban belanja listrik, beban belanja telepon, beban belanja air dan beban belanja internet.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.
14.900.646.284* Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.900.646.284,- dan Rp 6.757.646.094,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Ekuitas sebesar Rp. 8.143.000.190,- (120,56 %) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.904.813.195,- sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 6.757.646.094,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
10.348.275*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 10.348.275,- dan Rp 5.949.710,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.000.000	2.488.075	246,80
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.000.000	7.880.200	394,01
	Total Pendapatan	3.000.000	10.348.293	344,94

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
1.795.344.383*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.795.344.383,- dan Rp. 1.863.947.223,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	672.320.720	666.769.940	5.550.780	0,83
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.475	9.877	1.598	13,92
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.248.570	48.581.140	(332.570)	(0,68)
Beban Tunj. Anak PNS	13.522.168	13.012.252	509.916	3,77
Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000	26.142.420	(10.420)	(0,04)
Beban Tunj. Fungsional PNS	728.990.000	782.570.000	(53.580.000)	(6,85)
Beban Tunj. PPh PNS	84.949.578	104.877.586	(19.928.008)	(19,01)
Beban Tunj. Beras PNS	35.558.220	34.471.920	1.086.300	3,05
Beban Uang Makan PNS	111.334.000	106.388.000	4.946.000	4,44
Beban Tunjangan Umum PNS	6.780.000	6.255.000	525.000	7,74
Beban Tunjangan Kemahalan	67.500.000	76.950.000	(9.450.000)	(12,28)
Hakim				
Beban Uang Lembur	0	14.752.000	(14.752.000)	(100)
Total Belanja Brutto	1.795.344.731	1.880.780.135	(85.435.404)	(4,54)
Pengembalian Belanja	(348)	(185.062)	(184.714)	(99,81)
Total Belanja Netto	1.795.344.383	1.880.595.073	(85.250.690)	(4,53)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
52.343.327*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.343.327,- dan Rp. 27.610.750,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	52.343.327	27.610.750	24.732.577	47,25

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	52.343.327	27.610.750	24.732.577	47,25

D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa : Rp.
310.690.455*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 310.690.455,- dan Rp. 288.986.000,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	35.523.400	34.916.070	607.330	1,71
Beban Jasa Pos dan Giro	4.149.500	3.591.857	557.643	13,44
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	271.017.555	250.478.073	20.539.482	7,58
Total Beban Jasa	310.690.455	288.986.000	21.704.455	6,99

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 153.670.201*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 153.670.201,- dan Rp. 71.390.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.465.000	35.040.000	52.425.000	59,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.951.301	36.310.000	21.641.301	37,34

Beban Pemeliharaan lainnya	8.253.900	40.000	8.213.900	99,52
Total Beban Pemeliharaan	153.670.201	71.390.000	82.280.201	53,54

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
76.461.488*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.461.488,- dan Rp. 68.573.910,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	76.461.488	68.573.910	7.887.578	10,32
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota		0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota		0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	76.461.488	68.573.910	7.887.578	10,32

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 335.966.071,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 335.966.071,- dan Rp. 189.518.183,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90.320.950	46.173.402	44.147.548	48,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	245.645.121	143.344.781	102.300.340	41,64
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	335.966.071	189.518.183	102.300.340	41,64
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	335.966.071	189.518.183	102.300.340	41,64

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0

Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 180.850*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	392.850	230.600	162.250	70,35
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	212.000	83.850	128.150	152,83
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Laninnya	180.850	146.750	34.100	23,23

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	180.850	146.750	34.100	23,23
--	---------	---------	--------	-------

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.
6.757.646.094*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.757.646.094,- dan Rp. 3.706.206.267,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp.
(2.713.946.800)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp. 2.713.946.800,-) dan Rp. (Rp.2.503.976.456),- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

*Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas : Rp.
8.239.763.412*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.239.763.412,- dan Rp. 68.166.385,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	8.302.676.772
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(59.650.000)
Koreksi Lain-lain	(3.263.360)
Total Koreksi	8.239.763.412

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp. 2.617.183.578

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.617.183.578,- dan Rp. 5.487.249.989,-

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas : Rp. 8.143.000.190,-

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.143.000.190,- dan Rp. 3.051.439.827,-

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp. 14.900.646.284

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.900.646.284,- dan Rp. 6.757.646.094,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi Pendapatan dan belanja secara akrual yang dapat disajikan.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tapak Tuan adalah:

1. PT. BANK BRI CABANG TAPAKTUAN A/C 0264-01-000020-30-7 a.n. Bpg 074 Pengadilan Negeri Tapaktuan 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.
2. PT. BANK BRI CABANG TAPAKTUAN A/C 0264.01.000770.30.0 a.n. Bpg 074 Pengadilan Negeri Tapaktuan 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi ke 1 DJA : Revisi perubahan Hal. 3 data DIPA T.A 2017;
2. Revisi ke 2 DJA : Revisi perubahan Hal. 3 data DIPA T.A 2017;
3. Revisi ke 3 DJA : Revisi penambahan anggaran untuk belanja barang non operasional lainnya;
4. Revisi ke 4 DJA : Revisi perubahan Hal. 3 data DIPA T.A 2017;
5. Revisi ke 5 DJA : Revisi perubahan pagu anggaran untuk belanja pegawai (51);

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1.U10/01/KU.01/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 02 Januari 2017 telah mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan :

Kuasa Pengguna Anggaran : Iwan Rahayu, S.Kom

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Assuryatinur

Bendahara Pengeluaran : Surya Dharma, SH

Bendahara Penerimaan : Rizali Hasan, SE

Staf Pengelola Anggaran : Eko Putra Bangun, S.Kom

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Tapak Tuan

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Mini Bus	1	190.000.00	190.000.000	0
2.	Sepeda Motor	4	43.400.000	43.400.000	0
3.	Meteran Kain	1	7.000.000	7.000.000	0
4.	Mesin Ketik Manual	1	369.000	369.000	0
5.	Lemari Besi / Metal	1	4.400.000	440.000	3.960.000
6.	Lemari Kayu	17	50.075.000	50.075.000	0
7.	Rak Kayu	4	17.109.000	17.109.000	0
8.	Filling Cabinet Besi	9	12.800.000	12.800.000	0
9.	Brankas	1	674.000	674.000	0
10.	Tabung Pemadam Api	1	1.837.000	183.700	1.653.300
11.	CCTV	1	14.850.000	1.485.000	13.365.000
12.	Mesin Absensi	1	50.000.000	50.000.000	0
13.	Papan Pengumuman	1	2.500.000	2.500.000	0
14.	Meja Kerja Kayu	43	113.134.000	100.165.000	12.969.000
15.	Kursi Besi / Metal	26	62.265.000	41.326.500	20.938.500
16.	Meja Kerja Kayu	39	98.724.000	98.724.000	0
17.	Kursi Besi/metal	17	39.000.000	39.000.000	0
18.	Kursi Kayu	21	20.500.000	20.500.000	0
19.	Sice	5	26.000.000	26.000.000	0
20.	Meja Rapat	1	6.050.000	605.000	5.445.000
21.	Meja Resepsionis	2	26.400.000	2.640.000	23.760.000
22.	Kursi Fiberglass / Plastik	40	56.290.000	38.569.000	17.721.000
23.	Kursi Fiber Glas Plastik	30	36.300.000	36.600.000	0
24.	Partisi	2	1.400.000	1.400.000	0
25.	AC Split	7	15.728.000	15.728.000	0
26.	A.C Split	11	31.436.000	17.298.800	14.137.200

27. Kipas Angin	2	700.000	700.000	0
28. Televisi	2	886.000	886.000	0
29. Lambang Garuda Pancasila	3	959.000	959.000	0
30. Tiang Bendera	2	200.000	200.000	0
31. Lambang Instansi	2	9.955.000	4.024.900	5.930.100
32. UPS	5	22.240.000	5.164.000	17.076.000
33. Digital LED Running Text	1	7.700.000	770.000	6.930.000
34. LCD Monitor	1	14.000.000	14.000.000	0
35. Faksimili	1	800.000	800.000	0
36. PC Unit	14	137.954.000	68.318.500	69.635.500
37. Laptop	14	153.902.000	122.882.001	31.019.999
38. Printer	9	28.449.400	15.793.525	12.655.875
39. Scanner	2	13.399.000	7.149.625	6.249.375
40. Server	1	40.000.000	25.000.000	15.000.000
41. Router	1	9.999.000	3.749.625	6.249.375
B. Gedung dan Bangunan				
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.534.347.000	0	2.534.347.000
2. Gedung Pos Jaga Permanen	1	15.731.000	0	15.731.000
3. Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen	1	129.792.000	0	129.792.000
4. Rumah Negara Gol II Tipe B Permanen	9	939.870.000	0	939.870.000
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D. Aset Tetap Lainnya				
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		16.014.981.065	(1.110.342.270)	14.904.638.795
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		59.650.000	(59.650.000)	0